



**PEMBELAJARAN VOKASI SEBAGAI STRATEGI PEMBINAAN
KETERAMPILAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A JEMBER**

SKRIPSI

Oleh :

**Achmad Rizqi Putra Syahbana
NIM 190910302122**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
2026**



**PEMBELAJARAN VOKASI SEBAGAI STRATEGI PEMBINAAN
KETERAMPILAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A JEMBER**

*diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Sarjana Sosiologi (S1)*

SKRIPSI

Oleh :

**Achmad Rizqi Putra Syahbana
NIM 190910302122**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
2026**

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Orang tua tercinta, yaitu Alm. Ayahanda Mochammad Yusuf Sugianto dan Ibunda Farida yang telah mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Keluarga tercinta Alm. Kakek Abdul Azis, Almh. Nenek Tuffah, Bude Afifah, Pak de Tri, Tante Pipin, Tante Siti, Dea dan sepupu sepupu penulis Ovi, Mbak Ana, Rafi yang mendukung penulis sampai di titik ini.
3. Guru guru TK Kartika IV-73, SDN Kepatihan 06 Jember, SMPN 1 Jember, SMAN 2 Jember, serta bapak ibu dosen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember yang telah mendidik, membimbing dan mengajarkan banyak ilmu.
4. Almamater Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Diri saya pribadi Achmad Rizqi Putra Syahabana, yang mampu bertahan dan bersedia dan berproses hingga ke tahap ini.

MOTTO

"Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

(Potongan terjemahan Q.S Al-Hadid: 4)*)



^{*)}Departemen Agama Republik Indonesia. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan). Jakarta: Badan LITBANG dan Diklat Kemenag RI.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Rizqi Putra Syahbana

NIM : 190910302122

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

*Pembelajaran Vokasi Sebagai Strategi Pembinaan Keterampilan Bagi Narapidana
Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember*

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 Juni 2026

Yang menyatakan,

Achmad Rizqi Putra Syahbana

NIM. 190910302122

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “*Pembelajaran Vokasi Sebagai Strategi Pembinaan Keterampilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasayarakatan Kelas II A Jember*” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada :

Hari : Senin

Tanggal : 8 Juni 2026

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Dosen Pembimbing

Tanda Tangan

1. Pembimbing Utama

Nama : Nurul Hidayat, S.Sos, MUP

NIP : 197909142005011002

(.....)

Dosen Penguji

1. Penguji Utama

Nama : Dien Vidia Rosa, S.Sos, MA

NIP : 198303202008122001

(.....)

2. Penguji Anggota

Nama : Widowati S.Pd., M.Sos.

NIP : 199708262025062005

(.....)

ABSTRACT

Vocational learning is a form of coaching that aims to improve the skills and readiness of prisoners in facing life after release. This research aims to find out vocational learning as a skill development strategy for inmates through a job guidance program at the Class II A Jember Correctional Institution. The research uses a qualitative approach with a descriptive method through observation, interview, and documentation techniques involving correctional officers and inmates. The results of the study show that vocational learning is carried out through various productive job trainings such as carpentry, welding, and handicrafts that are tailored to the needs of the inmates and job opportunities in the community. The implementation of learning applies the principles of andragogy which emphasizes hands-on learning experience, active participation, and independence. Job guidance programs not only improve technical skills, but also shape inmates' attitudes of discipline, responsibility, confidence, and work ethic. Thus, vocational learning through the job guidance program at the Class II A Jember Correctional Institution has proven to be an effective coaching strategy in improving skills while preparing inmates to be able to reintegrate socially, live independently, and play a productive role in the community after serving their sentence.

Keywords: correctional institutions, inmates, job guidance skills development, vocational learning.

RINGKASAN

Pembelajaran Vokasi Sebagai Strategi Pembinaan Keterampilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember: Achmad Rizqi Putra Syahbana; 190910302122; 46 halaman; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

Negara Republik Indonesia berupaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila melalui sistem pemasyarakatan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga membina narapidana agar kembali menjadi warga negara yang taat hukum dan produktif. Lembaga Pemasyarakatan berperan melaksanakan pembinaan melalui program bimbingan kerja dan pembelajaran vokasi guna meningkatkan keterampilan, kemandirian, serta kesiapan sosial warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember sebagai lapas kategori II A di wilayah Tapal Kuda menyelenggarakan berbagai pembinaan kepribadian dan kemandirian, terutama bagi narapidana kasus narkoba, melalui pelatihan keterampilan, kegiatan keagamaan, dan dukungan berbagai instansi serta masyarakat. Secara teoritis, penelitian ini didasarkan pada konsep pembelajaran vokasi, pembinaan narapidana, serta pendekatan andragogi yang menekankan pembelajaran orang dewasa melalui pengalaman dan partisipasi aktif, sehingga pembelajaran vokasi dipandang sebagai strategi pembinaan yang efektif dalam mempersiapkan narapidana untuk kembali berintegrasi dan hidup mandiri di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dalam pembinaan keterampilan narapidana beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Informan dipilih melalui *purposive* dan *accidental sampling*. Data diperoleh dari wawancara, observasi non-partisipan, dan dokumentasi, kemudian diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber. Analisis data dilakukan secara deskriptif guna memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana.

Kriminalitas di Kabupaten Jember merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi perubahan sosial, ekonomi, dan kepadatan penduduk, sehingga diperlukan upaya penanggulangan melalui sistem pemasyarakatan. Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Jember berperan sebagai tempat pembinaan narapidana dengan mayoritas kasus berasal dari tindak pidana narkoba. Lapas yang berdiri sejak tahun 1886 ini melaksanakan pembinaan secara terstruktur melalui tahapan orientasi, pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, hingga integrasi sosial. Salah satu program utama adalah bimbingan kerja yang memberikan pelatihan keterampilan seperti pertukangan, meubel, tata boga, kerajinan tangan, perkebunan, dan *barbershop*, yang disesuaikan dengan minat, bakat, serta perilaku warga binaan. Program ini bertujuan meningkatkan keterampilan kerja, membangun kemandirian, mengurangi kejenuhan selama masa pidana, serta mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat secara produktif guna menekan angka residivisme.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran vokasi melalui program bimbingan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember efektif sebagai strategi pembinaan narapidana dalam meningkatkan keterampilan dan membentuk karakter. Program ini tidak hanya memberikan kemampuan teknis, tetapi juga menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan etos kerja, sehingga warga binaan memiliki bekal keterampilan, rasa percaya diri, serta kesiapan untuk hidup mandiri dan berintegrasi kembali secara positif di masyarakat setelah bebas.

PRAKATA

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT. Atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pembelajaran Vokasi Sebagai Strategi Pembinaan Keterampilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember*”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) pada Program Studi Sarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Nurul Hidayat, S.Sos., M. UP., selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu, pikiran, memberikan perhatian, nasihat, dan masukan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
2. Dien Vidia Rosa, S.Sos., M.A, selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini;
3. Seluruh dosen, staf, dan karyawan Program Studi Sarjana Sosiologi FISIP Universitas Jember yang saya hormati atas bimbingan, nasihat, dan ilmu yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember yang telah memberikan izin terhadap pelaksanaan penelitian ini;
5. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan Bapak Hendrik Hariyadi, S.H., Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, Kesehatan, dan Perawatan Bapak Bambang Heriyanto, S.H., M.M., Kepala Sub Seksi Registrasi Bapak Galih Marantika, S.H., Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja Bapak Muhammad Syaiful Anam, S.H. Yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Keluarga besar UKM Bola Basket FISIP Universitas Jember yang berbagi bahagia, sedih, semangat, pengalaman yang berharga;

7. Teman-teman terdekat saya “Grind Boys” Rafly dan Dimas yang senantiasa memberi dukungan, semangat dan bantuan selama pengerjaan tugas akhir ini;
8. Teman-teman angkatan 2019 Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember yang berbagi pengalaman yang berharga;
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat, serta doa yang tulus demi terselesaikannya skripsi ini.

Jember, 8 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
ABSTRACT	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1 Manfaat Teoritis	4
1.4.2 Manfaat Praktis	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pembelajaran Vokasi.....	5
2.2 Lembaga Pemasarakatan	6
2.3 Pembinaan	7
2.4 Narapidana	8
2.5 Landasan Teori Andragogi	9
2.6 Kerangka Berpikir.....	13
2.7 Tinjauan Studi Terdahulu.....	13
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN.....	16
3.1 Pendekatan Penelitian	16
3.2 Lokasi Penelitian	16
3.3 Fokus Penelitian	16

3.4 Penentuan Informan Penelitian	16
3.5 Keabsahan Data	17
3.6 Analisis Data	17
3.6.1 Sumber Data.....	17
3.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	18
BAB 4. PEMBAHASAN	20
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Letak Geografis	20
4.2 Profil Lembaga Pemasyarakatan	21
4.2.1 Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember	21
4.2.2 Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.....	22
4.2.3 Struktur Organisasi Lembaga	23
4.2.4 Tugas dan Fungsi Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember	23
4.2.5 Data WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan).....	26
4.3 Program Bimbingan Kerja	27
4.3.1 Perencanaan Program Bimbingan Kerja.....	28
4.3.2 Pelaksanaan Program Bimbingan Kerja	32
4.3.3 Evaluasi Program Bimbingan Kerja	39
4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat	40
4.4.1 Faktor Pendukung	40
4.4.2 Faktor Penghambat	42
4.5 Analisis Teori.....	43
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	45
5.1 Kesimpulan	45
5.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN.....	48

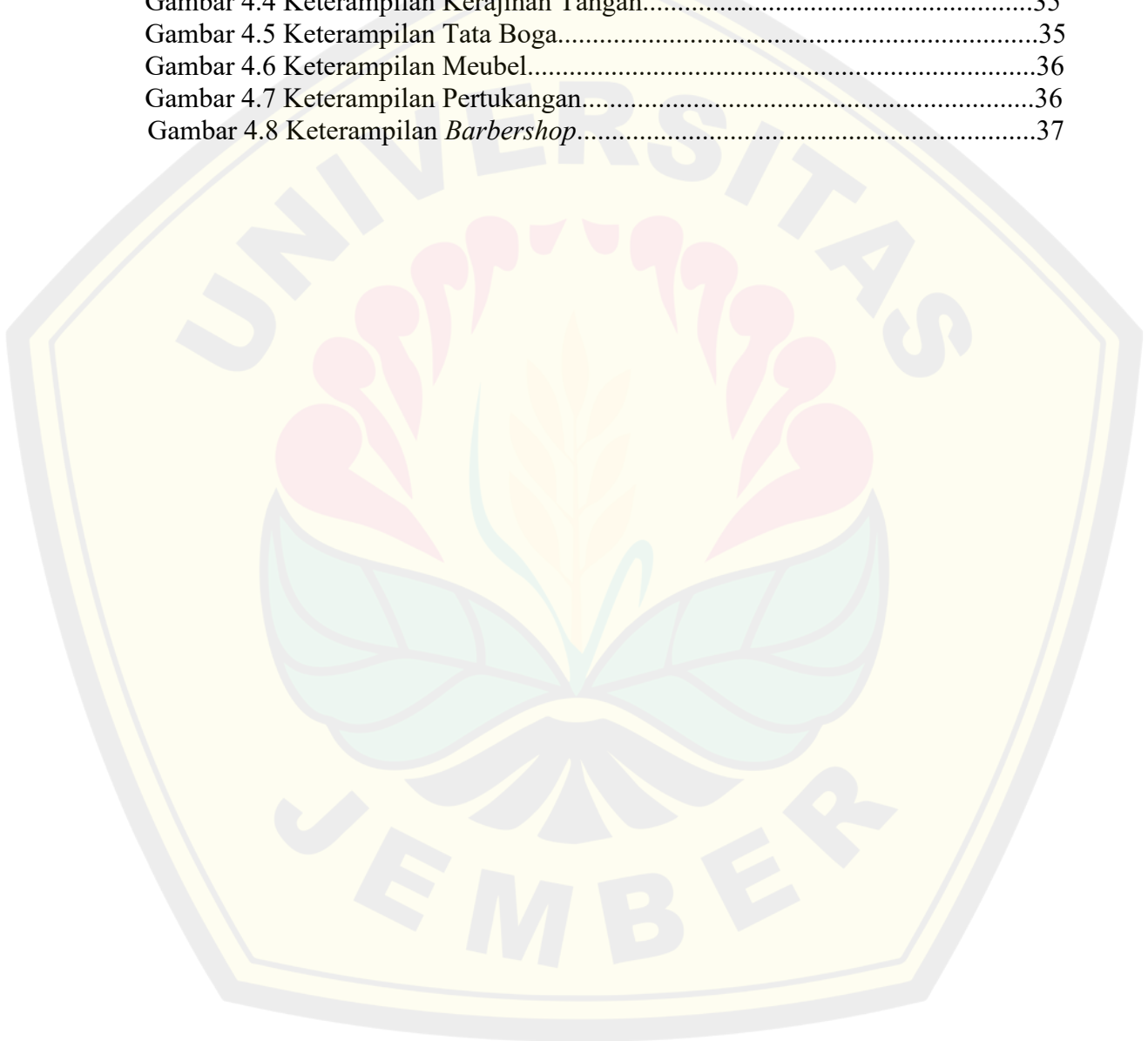
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 4.1 Data WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan).....	26
Tabel 4.2 Data WBP yang Mengikuti Program Bimbingan Kerja.....	27
Tabel 4.3 Jadwal Program Bimbingan Kerja.....	33



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	13
Gambar 4.1 Peta Lokasi Penelitian.....	21
Gambar 4.2 Struktur Organisasi LAPAS Kelas II A Jember.....	23
Gambar 4.3 Keterampilan Perkebunan.....	34
Gambar 4.4 Keterampilan Kerajinan Tangan.....	35
Gambar 4.5 Keterampilan Tata Boga.....	35
Gambar 4.6 Keterampilan Meubel.....	36
Gambar 4.7 Keterampilan Pertukangan.....	36
Gambar 4.8 Keterampilan <i>Barbershop</i>	37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi dan Surat Perijinan Penelitian.....	48
---	----



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia berkomitmen untuk membangun masyarakat yang berdasarkan Pancasila yang adil dan makmur. Negara menghadapi banyak tantangan dan hambatan dalam usahanya, terutama dari para pelanggar hukum. Tugas Negara belum selesai dengan menangkap, mengadili, dan menahan para pelanggar hukum tersebut sebagai narapidana. Pada akhirnya, mereka harus dilepas kembali kepada masyarakat sebagai warga negara yang taat pada hukum.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagaimana dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat 3. Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mulanya bernama penjara, penjara merupakan tempat bagi orang yang menjalani hukuman setelah melakukan tindak kriminal atau kejahatan. Lembaga Pemasyarakatan memiliki kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Seperti halnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember adalah satu-satunya Lembaga Pemasyarakatan yang berkategori II A seTapal Kuda (Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi), dengan kategori tersebut maka kapasitas jumlah hunian standar 250-500 orang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember didirikan pada masa penjajahan kolonial Belanda, yakni pada tahun 1886. Sebagai tempat menjalani masa pidana bagi orang-orang pribumi yang oleh pemerintah Belanda dianggap bersalah waktu itu. Dengan luas areal sekitar $\pm 8.790 \text{ m}^2$ dan daya tampung 250-500 orang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember hanya berapa kali mengalami renovasi, namun demikian renovasi tidak merubah ciri khas penjara yang sudah melekat. Hal ini dapat dilihat pada kamar-kamar yang menggunakan jeruji besi dan terlihat pada konstruksi bangunan kantornya. Bimbingan kerja merupakan program

pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk warga binaan pemasyarakatan yang hukumannya telah ditetapkan oleh hakim, semua warga binaan diwajibkan mengikuti bimbingan kerja dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember warga binaan pemasyarakatan mayoritas adalah tindak pidana narkotika sehingga dapat mengikuti program bimbingan kerja. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Galih Marantika, S.H sebagai Kasubsi Registrasi bahwa narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember sebagian besar penyalahgunaan narkoba, mayoritas pemakai narkoba, sabu-sabu dan obat-obatan terlarang, apabila sudah kecanduan berat maka akan di layar ke Lembaga Pemasyarakatan khusus rehabilitasi narkoba, tetapi selama ini belum ada yang sampai kecanduan berat, sehingga dapat direhabilitasi sendiri.

Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem pemasyarakatan adalah membina warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan mereka, dapat memperbaiki diri, dan tidak melakukan tindak pidana lagi sehingga mereka dapat diterima kembali di lingkungan mereka. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat melaksanakan pembinaan bagi narapidana. Sedangkan warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan adalah seorang yang berada dalam bimbingan balai pemasyarakatan (Undang- undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 9).

Salah satu jenis pembinaan yang diberikan kepada narapidana adalah pengembangan keterampilan yang akan sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka setelah mereka bebas dari lembaga pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab atas proses pembinaan keterampilan narapidana. Pembinaan kepribadian, kemandirian, dan asimilasi diberikan. Membantu seorang narapidana bangkit menjadi orang yang baik juga merupakan bagian dari pembinaan. Tujuan pembinaan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kualitas pribadi dan moral narapidana. Tujuannya adalah untuk menanamkan rasa harga diri dan kesadaran bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang aman dan sejahtera di mana mereka dapat hidup. Dengan demikian, narapidana dapat menjadi orang yang bermoral tinggi dan berprestasi

luhur. Pembinaan narapidana meliputi pembinaan kepribadian yang diantaranya terdiri dari atas pembinaan mental dan rohani, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kemandirian yang terdiri dari keterampilan membatik, mengelas, pertukangan dan kerajinan tangan serta keterampilan yang mendukung usaha mandiri seperti berdagang. Selain itu Lembaga Pemasyarakatan juga mengadakan pembinaan yang bersifat hiburan seperti olahraga, hadrah dan kesenian daerah.

Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pembinaan kepada narapidana bukan saja dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga melibatkan peran masyarakat. Peran petugas pemerintah serta kelompok masyarakat sangat besar pengaruhnya dalam proses pembinaan bidang keterampilan bagi narapidana. Petugas tersebut berasal dari berbagai instansi, yaitu Departemen Agama, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan dan Departemen Tenaga Kerja. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan juga bekerja sama dengan LSM-LSM, pemuka agama serta psikologi. Hal ini penting dilakukan untuk menunjang kelancaran proses pembinaan bidang keterampilan bagi narapidana. Dalam penelitian ini mengambil tempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dengan alasan di Lembaga tersebut telah diterapkan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan narapidana untuk dapat kembali ke masyarakat sehingga diharapkan tidak kembali lagi bertindak kriminal seperti dulu. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :

**“PEMBELAJARAN VOKASI SEBAGAI STRATEGI PEMBINAAN
KETERAMPILAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A JEMBER”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pembelajaran vokasi sebagai strategi pembinaan keterampilan bagi narapidana melalui program bimbingan kerja yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui pembelajaran vokasi sebagai strategi pembinaan keterampilan bagi narapidana melalui program bimbingan kerja yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan yang telah ditentukan dalam penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah perbendaharaan ilmu yang dikembangkan sosiologi yang berkaitan dengan pembelajaran vokasi sebagai strategi pembinaan keterampilan bagi narapidana.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan peranannya sebagai lembaga yang memberikan pembinaan keterampilan bagi narapidana.
- b. Penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi narapidana agar ia secara sadar mau mengikuti semua proses pembinaan sehingga setelah bebas, ia dapat mengaplikasikannya dengan baik.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu konsep. Konsep digunakan untuk mempermudah dalam menemukan masalah-masalah yang saling berkaitan. Konsep dasar dibutuhkan agar peneliti tidak keluar dari permasalahan yang ada. Definisi konsep menurut (Idrus, 2009) adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan gejala secara abstrak, seperti kejadian, keadaan, dan kelompok. Melalui konsep ini, peneliti dapat menyederhanakan pemikiran dengan istilah yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penjelasan di atas maka konsep dasar yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pembelajaran Vokasi
- b. Lembaga pemasyarakatan
- c. Pembinaan
- d. Narapidana

2.1 Pembelajaran Vokasi

Pendidikan dan pelatihan vokasi adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pada keterampilan, keahlian, pengertian, perilaku, sikap, kebiasaan kerja, dan apresiasi terhadap pekerjaan yang dibutuhkan oleh dunia bisnis dan industri. Jenis pendidikan ini bekerja sama dengan masyarakat bisnis dan industri dalam kontrak dengan lembaga asosiasi profesi dan berbasis produktivitas (Putusudira, 2012).

Pendidikan vokasi adalah pendidikan dengan tujuan utama mempersiapkan peserta didik untuk bersaing dalam bekerja dengan menggunakan pendekatan pendidikan berbasis kompetensi. Selain itu, pendidikan vokasi adalah jenjang pendidikan yang selalu berubah untuk menyesuaikan kurikulum dengan pertumbuhan pasar kerja dan beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berarti bahwa pendidikan vokasi akan selalu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Fokus pendidikan vokasi adalah pendidikan bekerja (*work education*) atau pendidikan teknologi karena aktivitas ekonomi sangat bergantung pada perubahan teknologi yang cepat. (Pavlova, 2017).

Sesuai dengan Keputusan Mendikbud No. 0490/U/1990, tujuan pendidikan vokasi di Indonesia adalah (Basukibawa, 2017) sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memperluas pendidikan dasar.
- b. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat untuk berinteraksi dengan sosial, budaya, dan sekitar.
- c. Meningkatkan kemampuan siswa untuk mengembangkan diri sejalan dengan kemajuan ilmu dan teknologi.
- d. Menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesional.

2.2 Lembaga Pemasyarakatan

Dalam sistem baru pembinaan narapidana bangunan Lembaga Pemasyarakatan mendapat prioritas khusus. Sebab bentuk bangunan yang sekarang ada masih menunjukkan sifat-sifat asli penjara, sekalipun image yang menyeramkan dicoba untuk dinetralisir (Harsono, 1995).

Penjara dulu sebutan tempat bagi orang yang menjalani hukuman setelah melakukan kejahatan. Istilah “penjara” di Indonesia sekarang sudah tidak dipakai dan sudah diganti dengan sebutan “Lembaga Pemasyarakatan” karena sejarah pelaksanaan pidana penjara telah mengalami perubahan dari sistem kepenjaraan yang berlaku sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai munculnya gagasan hukum pengayoman yang menghasilkan perlakuan terhadap narapidana dengan sistem pemasyarakatan.

Dalam Undang-undang No.12 tahun 1995 diatur tentang Pemasyarakatan Pasal (12) ayat (1) yang berbunyi:

“Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar: a. Umur; b. Jenis kelamin; c. Lama pidana yang dijatuhkan; d. Jenis kejahatan; e. Kriteria lain yang sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan”.

Lembaga Pemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas). Dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini terdiri atas

bagian-bagian yang memiliki tugas serta kewenangan masing-masing. Bagian-bagian tersebut masih dibagi ke dalam sub seksi yang bertujuan mewujudkan efektifitas kerja.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan narapidana dibina secara teratur dan berencana supaya mereka dapat memasuki kembali kehidupan masyarakat. Mereka dibina untuk menjadi anggota masyarakat agar tidak lagi melanggar hukum, dibimbing agar berguna, aktif dan produktif dalam pembangunan serta dituntun kembali agar menjadi manusia seutuhnya yang sanggup hidup bahagia di dunia dan akhirat. Dengan demikian dalam sistem pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia terkandung cita-cita luhur.

2.3 Pembinaan

Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki, dengan tujuan membantu orang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup kerja, yang sedang dijalani secara lebih efektif (Mangunhardjana, 1991). Pada awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. “Dasar hukum atau Undang-Undang yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah Reglemen Penjara (*Gestichten Reglement*) Stbl. 1917 No. 708” (Harsono, 1995). Dapat dikatakan bahwa perlakuan terhadap narapidana pada waktu itu adalah seperti perlakuan penjajah Belanda terhadap pejuang yang tertawan. Mereka diperlakukan sebagai obyek semata yang dihukum kemerdekaannya, tetapi tenaga mereka seringkali dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan fisik. Ini menjadikan sistem kepenjaraan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada 4 komponen penting dalam pembinaan narapidana (Harsono, 1995), yaitu:

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekat.

- c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih di luar Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat atau pejabat setempat.
- d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keamanan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, Hakim dll.

Pembinaan narapidana adalah memberikan narapidana materi atau kegiatan yang efektif dan berguna yang dapat membantu mereka mengubah cara mereka berpikir, bertindak, atau bertingkah laku. Secara umum narapidana adalah manusia biasa, seperti kita semua tetapi tidak menyamakan begitu saja, karena menurut hukum ada karakteristik tertentu yang menyebabkan seseorang disebut narapidana. Maka dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang atau antara narapidana yang lain.

Menurut pendapat (Harsono, 1995) bahwa tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi ke dalam 3 hal, yaitu:

- a. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat.

2.4 Narapidana

Narapidana adalah seorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode dan sistem pemasyarakatan, sehingga pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi manusia anggota masyarakat yang baik (Poernomo, 1986). Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 pasal 1 butir 6 mendefinisikan, “Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap”.

2.5 Landasan Teori Andragogi

Konsep pendidikan untuk orang dewasa adalah elemen penting yang perlu diperhatikan dalam pendidikan saat ini. Kita tidak selalu berbicara dan memeriksa pendidikan siswa yang relatif muda. Di dunia kerja, banyak orang dewasa yang membutuhkan pendidikan, baik informal maupun nonformal, seperti kursus, penataran, keterampilan, dan sebagainya (Lunandi, 2010). Masalah yang sering muncul adalah bagaimana kiat dan strategi membelajarkan orang dewasa yang notabene tidak menduduki bangku sekolah. Dalam hal ini, orang dewasa sebagai siswa dalam kegiatan belajar mengajar tidak dapat diperlakukan seperti anak-anak didik biasa yang sedang duduk di bangku sekolah tradisional.

Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa orang dewasa yang tumbuh sebagai pribadi dan memiliki konsep diri yang matang bergerak dari ketergantungan seperti pada masa kanak-kanak menuju kemandirian atau pengarahan diri sendiri. Kebutuhan psikologi yang sangat dalam, yaitu keinginan untuk dipandang dan diperlakukan oleh orang lain sebagai individu yang mengarahkan dirinya sendiri daripada diarahkan, dipaksa, atau dimanipulasi oleh orang lain, muncul sebagai hasil dari kematangan psikologi orang dewasa sebagai individu yang mampu mengarahkan diri sendiri. Dengan demikian, orang dewasa akan tertekan dan tidak senang apabila menghadapi situasi yang tidak memungkinkannya menjadi dirinya sendiri. Pendidikan orang dewasa tidak dapat disamakan dengan pendidikan anak sekolah karena orang dewasa bukan anak kecil. Perlu dipahami apa yang mendorong orang dewasa untuk belajar, apa hambatan, yang dialaminya, apa yang diharapkannya, bagaimana ia dapat belajar paling baik dan sebagainya (Saifuddin, 2010).

Kegiatan pendidikan baik melalui jalur sekolah ataupun luar sekolah memiliki daerah dan kegiatan yang beranekaragam. Pendidikan orang dewasa terutama pendidikan masyarakat bersifat non formal sebagian besar dari siswa atau pesertanya adalah orang dewasa, atau paling tidak pemuda atau remaja. Oleh sebab itu, kegiatan pendidikan memerlukan pendekatan tersendiri. Dengan menggunakan teori andragogi, kegiatan atau usaha pembelajaran orang dewasa dalam kerangka pembangunan atau realisasi pencapaian cita-cita pendidikan seumur hidup, dapat

diperoleh dengan dukungan konsep teoritik atau penggunaan teknologi yang dapat dipertanggungjawabkan (Saifuddin, 2010).

Salah satu masalah dalam pengertian andragogi adalah adanya pandangan yang mengemukakan bahwa tujuan pendidikan itu bersifat mentransmisikan pengetahuan. Tetapi di lain pihak perubahan yang terjadi seperti inovasi dalam teknologi, mobilisasi penduduk, perubahan sistem ekonomi, dan sejenisnya begitu cepat terjadi. Dalam kondisi seperti ini, maka pengetahuan yang diperoleh seseorang ketika ia berumur 21 tahun akan menjadi usang ketika ia berumur 40 tahun. Apabila demikian halnya, maka pendidikan sebagai suatu proses transmisi pengetahuan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan modern. Oleh karena itu, tujuan dan kajian ini adalah untuk mengkaji berbagai aspek yang mungkin dilakukan dalam upaya membelajarkan orang dewasa (andragogi) sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah kependidikan, sebab pendidikan sekarang ini tidak lagi dirumuskan hanya sekedar sebagai upaya untuk mentransmisikan pengetahuan, tetapi dirumuskan sebagai suatu proses pendidikan sepanjang hayat (*long life education*).

Istilah andragogi berasal dari bahasa Yunani, *aner* artinya orang dewasa dan *agogus* artinya memimpin. Andragogi, yaitu ilmu menuntun atau mendidik manusia. Menurut Yuni Suwanto, andragogi adalah suatu proses pendidikan yang membantu warga masyarakat (orang dewasa) untuk menemukan dirinya dan menggunakannya dalam situasi untuk mendorong perkembangan seseorang atau masyarakat (Saifuddin, 2010).

Pendidikan orang dewasa sebagai realisasi ada yang bersifat *self directed learning* (belajar yang diarahkan oleh diri sendiri) disengaja, sistematis dan berkelanjutan, maupun dapat bersifat *other directed education* (pendidikan yang diarahkan orang lain). Yang pertama dalam arti orang dewasa bertanggung jawab sendiri atas rancangan dan kegiatan belajarnya. Sedangkan yang kedua dalam arti orang lain (guru, tim penyusun program, agen pendidikan) yang bertanggungjawab terhadap manajemen belajar (Lunandi, 2010). Tidak seperti anak-anak yang dalam beberapa tingkatan masih kerap kali menjadi objek pengawasan, pengendalian orang lain yaitu pengawasan dan pengendalian orang dewasa yang berada di

sekitarnya. Secara singkat dapat dikatakan dalam beberapa tingkat anak masih tergantung dan menerima kekuasaan orang lain di sekelilingnya. Dalam kegiatan pendidikan atau belajar orang dewasa bukan lagi menjadi objek sosialisasi yang seolah-olah dibentuk dan dipengaruhi untuk menyesuaikan dirinya dengan kegiatan dan kemauan pemegang otoritas atau kekuasaan di atas dirinya sendiri. Akan tetapi tujuan belajar atau pendidikan orang dewasa tentunya lebih mengarah akan pencapaian kemandirian identitas dirinya sendiri untuk menjadi dirinya sendiri.

Pendidikan dapat dirancang untuk percaya pada kemampuan diri pribadi (*self-affirmation*) yang pada akhirnya menghasilkan perjuangan kemerdekaan, membebaskan diri dari belenggu penjajah. Gagasannya dikenal dengan sebutan "*conscientization*" yang mendorong orang-orang untuk merdeka, membebaskan diri dari penjajahan dan mengendalikan dan menentukan nasibnya, dari konsep pendidikan yang berfungsi sebagai "bank" yang bertujuan untuk konformitas. Seseorang hendaknya berusaha memperbaiki dan meningkatkan martabatnya sebagai manusia, dipihak lain ada golongan yang menggunakan manusia sebagai alat (Freire, 2010).

Dalam menentang sistem ini Freire, menyarankan diselenggarakannya pendidikan yang mengajukan masalah yang mendobrak pola vertikal dari hubungan tradisional antara fasilitator, peserta belajar dan menyelenggarakan dialog horizontal. Menurut Freire (2010), prinsip-prinsip dalam "*conscientization*" adalah sebagai berikut:

- a. Tak seorang pun yang dapat mengajar siapa pun juga.
- b. Tak seorang pun yang belajar sendiri.
- c. Orang-orang harus belajar bersama, bertindak pada dunia mereka.

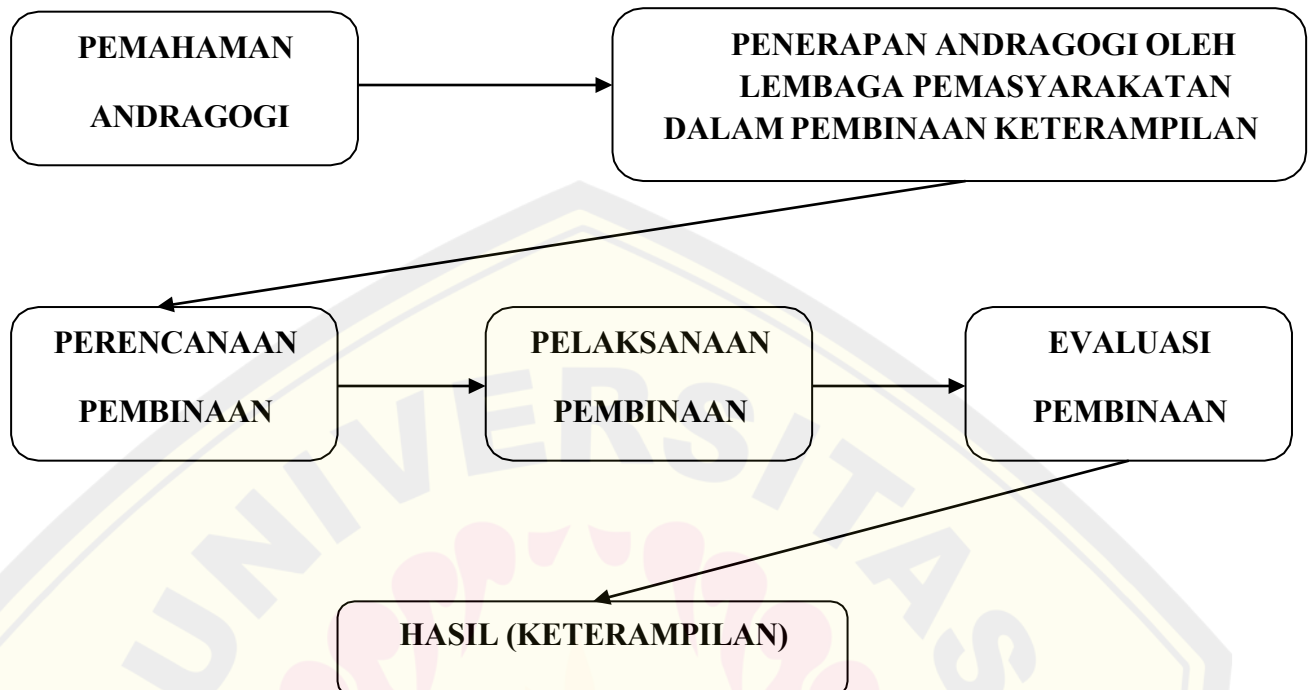
Dalam keadaan yang demikian, tidak ada lagi hubungan otoritas ketergantungan. Malahan dengan penjinakan (*domesticating*), pengalaman belajar memberikan kesempatan kepada orang dewasa untuk melakukan analisis kritis mengenai lingkungannya, untuk memperdalam persepsi diri mereka dalam hubungannya dengan lingkungannya dan untuk membina kepercayaan terhadap kemampuan sendiri dalam hal kreativitas dan kapabilitasnya untuk melakukan tindakan. Telah diselidiki bahwa keaksaraan pun apabila didekati dari sudut

pandang Freire, ditransformasikan dari hanya sekedar keterampilan teknis sederhana ke suatu komponen proses yang mencakup nilai pengembangan mentalitas yang dapat mengarahkan ke konsekuensi sosial dan politis (Freire, 2010).

Selama proses pengembangan, fasilitator dan peserta belajar harus bertanggung jawab satu sama lain. Menurut asumsi filosofis, sebagai makhluk yang sadar, pria dan wanita memiliki kemampuan untuk merefleksikan dan berinteraksi secara kritis dengan kenyataan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan harus selalu meningkatkan tantangan, mendorong mereka ke arah refleksi yang benar-benar kritis. Oleh karena itu, mereka meningkatkan lingkup persepsi mereka, menghadapi tantangan baru, dan menjadi tanggung jawab atas tindakannya yang spontan terhadap kenyataan. Freire menggambarkan seluruh proses ini sebagai humanisasi, yaitu upaya untuk mewujudkan kemanusiaan yang abadi, yang dia anggap sebagai lapangan kerja historis bagi pria (Saifuddin, 2010).

Meskipun banyak pendidik yang tidak menyetujui orientasi sosio-politik Freire, gagasannya mengenai penyadaran (*conscientization*) dan pendidikan pengajuan masalah, sangat besar pengaruhnya terhadap konsep yang melandasi sejumlah program pendidikan non-formal. Beberapa proyek bahkan mengubah cara peserta belajar untuk lebih memahami apa yang mereka lakukan. Misalnya, mereka menggunakan gambar untuk menunjukkan situasi nyata, membuat peserta belajar termotivasi untuk mengidentifikasi dan merenungkan situasi mereka saat ini, atau mereka menggunakan tema dan kata-kata yang sarat makna, yang diambil secara langsung dari kosakata peserta belajar yang luas (Saifuddin, 2010).

2.6 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

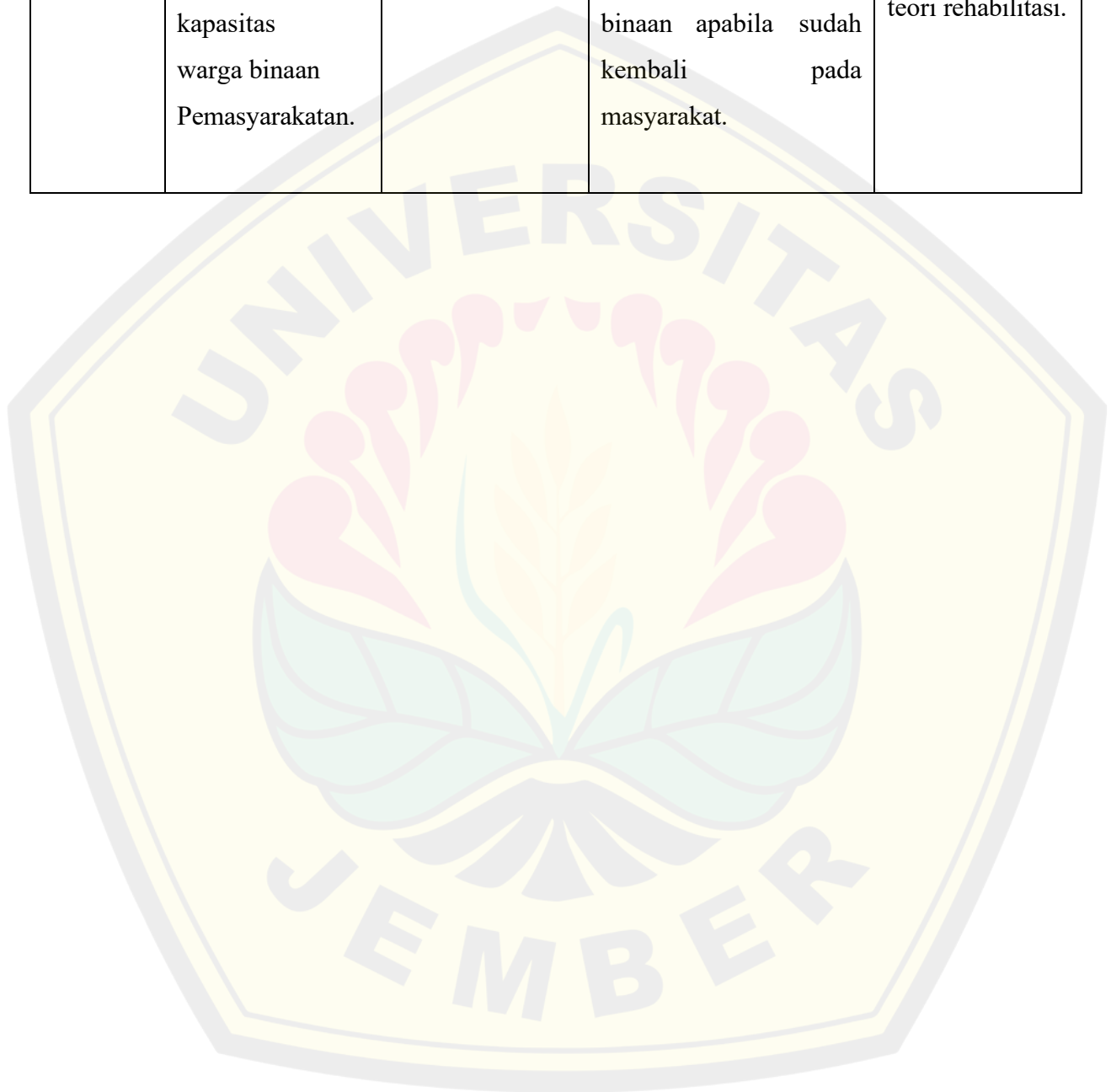
2.7 Tinjauan Studi Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Teori	Hasil Analisis	Perbedaan
Azriadi, (2011)	Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Biao.	teori retributif, teori relatif, teori pencegahan, teori rehabilitasi, teori integratif, teori prismatic.	Pelaksanaan pembinaan narapidana residivis disatukan dengan narapidana biasa, hal ini akan membuat pembinaan yang dilakukan oleh Lapas menjadi pembinaan biasa, menurut narapidana residivis pembinaan ini merupakan formalitas saja karena tidak ada perubahan dalam pembinaan tersebut. Hal ini menjadikan Lembaga Pemasyarakatan Tempat berkumpulnya para orang-orang yang telah	Perbedaan penelitian Azriadi dan peneliti adalah Azriadi melihat dari kajian-kajian dari ilmu hukum yang pada akhirnya hanya bisa melihat bahwa penyebab dari residivis adalah fasilitas di Lapas.

			melakukan kejahatan yang menghilangkan fungsi sesungguhnya dari Lembaga Pemasyarakatan yaitu tempat pembinaan.	
Diyan Rusita, (2013)	Proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bondowoso	Teori Patologi Sosial, Teori Behaviorisme	Penelitian ini mengkaji tentang pembinaan tahanan residivis, dimana pembinaan yang dilakukan untuk menghindari tahanan residivis maka sebagai langkah awal lembaga melakukan sosialisasi mengenai kesadaran hukum terhadap narapidana baru, dengan hal ini diharapkan para tahanan dapat mengerti kesalahan yang ia lakukan dan paham mengenai macam-macam tindakan yang dapat melanggar hukum.	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fenomena yang di ambil yaitu proses pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso.

Kunti Dhorifah, (2019)	Rehabilitasi berbasis kelembagaan melalui peningkatan kapasitas warga binaan Pemasyarakatan.	Teori Rehabilitasi.	Penelitian ini mengkaji tentang peningkatan kapasitas warga binaan pemasyarakatan dan bekal untuk warga binaan apabila sudah kembali pada masyarakat.	Perbedaan penelitian ini adalah pada bagian teori yang dimana penelitian ini menggunakan teori rehabilitasi.
------------------------	--	---------------------	---	--



BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah (Moleong, 2007:5). Metode penelitian secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik tertentu. Adapun aspek-aspek yang dideskripsikan meliputi Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Keterampilan Bagi Narapidana, faktor pendukung dan faktor penghambatnya.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, Jawa Timur.

3.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah bagaimana peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dalam membina narapidana yang sesuai dengan Undang-undang Pemasyarakatan. Yang meliputi peranan lembaga pemasyarakatan, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat.

3.4 Penentuan Informan Penelitian

Menurut Moleong (2007:132) “Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian”. Informan dalam penelitian ini merupakan orang yang dapat memberikan informasi maupun keterangan mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penentuan informan di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* dan *Accidental Sampling*. *Purposive Sampling* yakni dengan cara sengaja karena alasan-alasan sifat yang diketahui dari sampel tersebut atau menetapkan informan yang dianggap tahu dalam masalah yang sedang diteliti

secara mendalam, sementara dalam *Accidental Sampling*, orang yang diambil sebagai anggota sampel adalah mereka yang kebetulan ditemukan atau mereka yang mudah ditemukan atau dijangkau (Soehartono, 2008:62-63). Adapun yang menjadi informan penelitian ini antara lain :

- a. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, yaitu Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, Kesehatan, dan Perawatan., Kepala Sub Seksi Registrasi., Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja, sebagai informan utama.
- b. Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, sebagai informan pendukung.

3.5 Keabsahan Data

Dalam penelitian ini keabsahan data diperoleh dengan cara triangulasi data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya karena dibandingkan dari berbagai segi. Hasil wawancara dengan hasil observasi tersebut perlu dibandingkan untuk mengetahui fokus penelitian yaitu bagaimana peranan LAPAS Jember dalam membina narapidana yang sesuai dengan Undang-undang Pemasyarakatan, yang meliputi peranan LAPAS, faktor-faktor yang menghambat dan mendukung.

Triangulasi sumber adalah proses untuk menguji kredibilitas suatu data dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya (Wijaya, 2018:121).

3.6 Analisis Data

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif sesuai dengan proses dari pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif. Teknik analisis data adalah salah satu cara untuk menganalisa data mentah yang dikumpulkan sebagai bahan penulisan. Penulis mengumpulkan data-data mentah dari buku, jurnal, dan berita.

3.6.1 Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara yang berkaitan dengan Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung. Data tersebut berupa buku, literature, jurnal, laporan-laporan, surat kabar, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini

3.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi, wawancara, dan observasi.

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara pengumpulan data-data sekunder yang diperoleh dari kegiatan dalam peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana. Metode ini dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari dokumen- dokumen serta mencatat data tertulis yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Sehingga semua dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang bersangkutan dapat dicatat sebagai sumber informasi. (W. Gulo:2007:123).

Adapun studi dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Gambar sebagai proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun seperti foto, gambar hidup, sketsa, dan lainnya.
2. Sumber data tertulis yaitu sumber resmi dan tak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh lembaga/perorangan atas nama lembaga. Ada dua bentuk yaitu sumber resmi formal dan sumber resmi informal.
3. Sumber tidak resmi, merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga.

b. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2009:73) mengemukakan beberapa macam wawancara diantaranya adalah wawancara terstruktur, semistruktur dan tidak terstruktur. Dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis memilih melakukan metode wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*) yaitu wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

c. Observasi

Menurut Sugiyono (2009:204) observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Apabila dilihat pada proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi partisipan dan non-partisipan.

- a. Observasi partisipan yaitu proses pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara terlibat langsung pada kegiatan yang diamati untuk melakukan pencatatan serta pengumpulan data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- b. Observasi non partisipan adalah dimana peneliti tidak ikut secara langsung dalam kegiatan orang yang akan diobservasi, dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat dengan memperhatikan situasi yang terjadi.

Berdasarkan uraian di atas maka jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi non-partisipan. Dalam melakukan observasi, peneliti memilih hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

BAB 4. PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Letak Geografis

Kriminalitas merupakan fenomena sosial yang terus berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat. Perubahan sosial, ekonomi, serta kepadatan penduduk turut memengaruhi tingkat dan jenis tindak kejahatan yang terjadi di suatu wilayah. Kabupaten Jember sebagai salah satu daerah dengan jumlah penduduk yang besar di Provinsi Jawa Timur juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan kriminalitas.

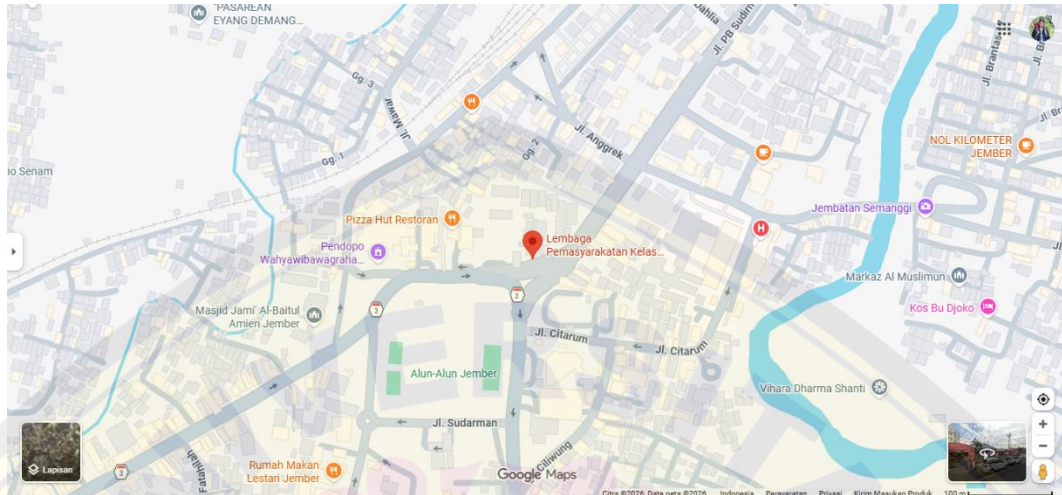
Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kriminal di Jember menunjukkan variasi bentuk kejahatan, mulai dari pencurian, penyalahgunaan narkoba, kekerasan, hingga pelanggaran hukum lainnya. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada keamanan masyarakat, tetapi juga memunculkan kebutuhan akan upaya penanggulangan yang bersifat preventif, represif, serta rehabilitatif melalui sistem peradilan pidana dan lembaga pemasyarakatan.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai gambaran kriminalitas di Jember menjadi penting untuk memahami faktor penyebab, karakteristik pelaku, serta strategi pembinaan yang dilakukan guna menekan angka residivisme dan mendorong reintegrasi sosial narapidana ke dalam masyarakat.

Letak lokasi yang dibahas di dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember yang bertempat di Jl. PB Sudirman No. 13, Pagah, Jemberlor, Kec. Patrang, Kab. Jember, Jawa Timur. Untuk memahami kondisi lokasi penelitian dan mendapatkan gambaran umum lokasi penelitian, berikut ini dapat ditarik kesimpulan secara cermat dari uraian lokasi penelitian. Letak geografis Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember berada di lokasi yang strategis yakni di jantung kota Jember di Jl. PB Sudirman No. 13 Jember dan dekat Pusat Pemerintahan Kabupaten Jember dengan Luas ± 8790 m². Adapun batasan-batasannya yakni:

- a. Di sebelah barat dibatasi oleh Gedung Jember Nusantara.
- b. Di sebelah timur dibatasi oleh Jalan Raya PB Sudirman Jember.

- c. Di sebelah utara dibatasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan pemukiman penduduk.
- d. Di sebelah selatan dibatasi oleh alun -alun kota Jember.



Gambar 4.1 Peta Lokasi Penelitian

4.2 Profil Lembaga Pemasarakatan

4.2.1 Sejarah Singkat Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember merupakan salah satu dari sebuah unit pelaksana teknis penyelenggara Lembaga Pemasarakatan di Kabupaten Jember yang memiliki fungsi ganda sebagai Rutan Negara dan Lembaga Pemasarakatan.

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember didirikan pada zaman penjajahan Belanda yaitu pada tahun 1886, Sebagai tempat pelayanan penduduk pribumi yang kemudian dinyatakan bersalah pemerintah Belanda. Karena bangunan Lembaga Pemasarakatan awalnya dibangun di zaman pemerintahan kolonial Belanda, tentunya bentuk dari bangunannya adalah bangunan Belanda dengan arsitektur yang megah dan bekas penjara yang khas. Lembaga Pemasarakatan Kelas II A hanya mengalami beberapa kali perenovasian saat sejak dibangun pada 1886, namun renovasi tersebut tidak mengubah karakteristik Lapas. Hal ini terlihat, misalnya di setiap bilik warga binaan yang masih memakai jeruji besi, serta gedung perkantornya juga ada yang ciri khas bangunan Belanda. Beberapa renovasi itu dilakukan selama 4 kali di beberapa tahun yakni renovasi

pertama pada tahun 1983, renovasi kedua pada tahun 1984, renovasi ketiga pada tahun 1990, dan renovasi terakhir pada tahun 1994.

Untuk keperluan hunian, kapasitas ideal Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember adalah 390 narapidana. Mereka berlokasi di 30 blok kamar, yang dibagi beberapa bagian, yakni:

- a. Blok A terdiri atas 19 blok hunian yang ditempati oleh tahanan.
- b. Blok B terdiri atas 5 blok hunian yang ditempati oleh narapidana.
- c. Blok C terdiri atas 6 blok hunian yang ditempati oleh narapidana.
- d. Blok D yang terdapat 1 blok hunian yang ditempati oleh para tahanan dan narapidana wanita.
- e. Kamar isolasi 4 buah.

4.2.2 Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember

Adapun tujuan, serta visi dan misi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember adalah sebagai berikut:

VISI

“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”

MISI

Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas

Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas

Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas

Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia

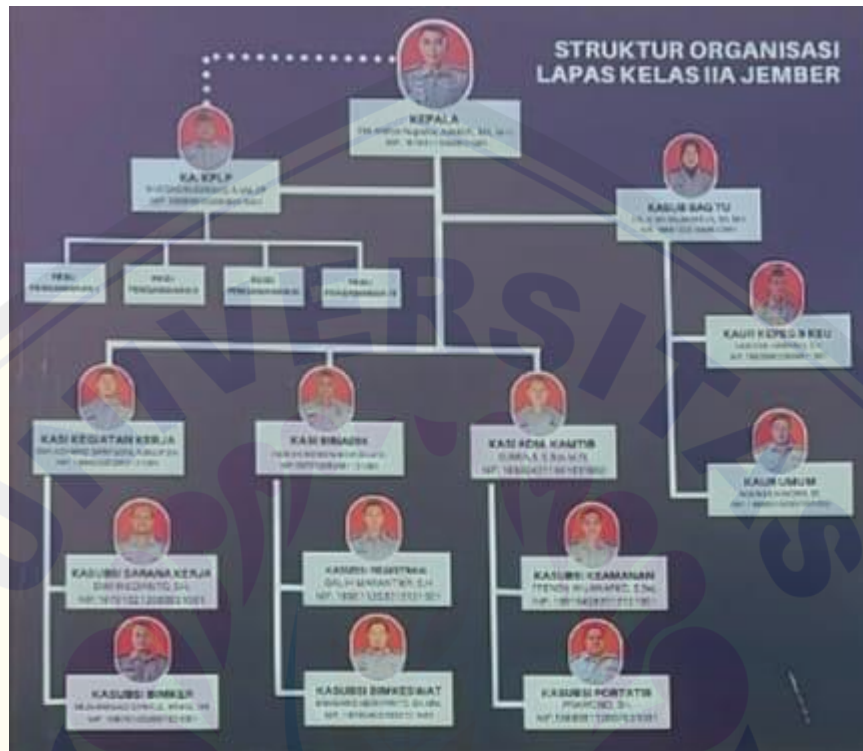
Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Imigrasi dan

Pemasyarakatan

Mewujudkan aparatur Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang profesional dan berintegritas.

4.2.3 Struktur Organisasi Lembaga

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember merupakan salah satu bentuk organisasi, sehingga di dalamnya terdapat struktur organisasi untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Lapas Kelas II A Jember

4.2.4 Tugas dan Fungsi Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember

Tugas dan Fungsi pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember terdiri dari:

a. Sub Bagian Tata Usaha

- Tugas: Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS
- Fungsi: Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan, melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

1) Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.

2) Urusan Umum

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga

b. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik

- Tugas: Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana / anak didik
- Fungsi: Merekam dan menyusun statistik dan sidik jari, memberi bimbingan pemasyarakatan, perawatan kesehatan dan perawatan narapidana / anak didik.

Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik terdiri:

1) Sub Seksi Registrasi

Sub komite Registrasi bertugas melakukan pendaftaran, pembuatan statistik dan pencatatan sidik jari narapidana/ anak didik.

2) Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

Sub komite Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan bertugas melakukan bimbingan dan konseling spiritual serta pembinaan olahraga, asimilasi, cuti bersyarat dan kesejahteraan narapidana / anak didik serta kepedulian terhadap masyarakat, dan perawatan kesehatan.

c. Seksi Kegiatan Kerja

- Tugas : Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja
- Fungsi : Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana / anak didik dan mengelola hasil kerja, dan mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

Seksi Kegiatan Kerja terdiri dari:

1) Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengolahan Hasil Kerja

Sub komite bimbingan kerja dan pengolahan hasil kerja bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan konseling tentang pelatihan kerja bagi narapidana / anak didik serta mengolah hasil kerja.

2) Sub Seksi Sarana Kerja

Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana

kerja.

d. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

- Tugas: Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib bertanggung jawab untuk mengatur jadwal kerja, menggunakan peralatan dan mengalokasikan tugas perlindungan, menerima laporan harian dan risalah dari departemen keamanan yang sedang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keselamatan dan keamanan, serta penerapan peraturan dan ketentuan.
 - Fungsi: Mengatur jadwal, menggunakan peralatan dan mendistribusikan tugas keamanan, menerima laporan harian dan risalah dari unit keamanan yang bertugas, dan menghasilkan laporan keamanan berkala serta menegakkan peraturan.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

1) Sub Seksi Keamanan

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

2) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Sub bagian Laporan Tata Tertib bertanggung jawab menerima laporan harian dan risalah dari satuan pengamanan.

e. Kesatuan Pengamanan LAPAS

- Tugas: Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS
- Fungsi: Melaksanakan penahanan dan mengawasi narapidana / anak didik, melakukan penjagaan dan pendisiplinan, mengawasi penerimaan, penempatan dan pembebasan narapidana / anak didik, melakukan pemeriksaan keamanan, menyusun laporan dan sidang harian.

Peran dalam menjalankan tugas dan fungsi Kesatuan Pengamanan LAPAS yaitu:

- 1) Kesatuan Pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahi petugas pengamanan LAPAS.
- 2) Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAPAS.

4.2.5 Data WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan)

Tabel 4.1 Data Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Kelas IIA Jember Tahun 2026

No.	Jenis Kejahatan	Narapidana	Tahanan	Jumlah
1	Narkotika	381	59	440
2	Perlindungan Anak	137	20	157
3	Pembunuhan	26	3	29
4	Perampokan	6	-	6
5	Kesusilaan	1	1	2
6	Kekerasan Seksual	15	4	19
7	Korupsi	8	6	14
8	Kesehatan	23	4	27
9	Pencurian	63	27	90
10	Pelanggaran Lalu Lintas	5	-	5
11	Senjata Tajam/Api	3	1	4
12	Penipuan	23	6	29
13	Penganiayaan	29	11	40
14	Perbankan	3	-	3
15	Mata Uang	2	1	3
16	Kriminal	3	-	3
17	Penggelapan	9	11	20
18	Pertambangan	1	-	1
19	Penadahan	10	-	10
20	Informasi dan Transaksi Elektronik	4	3	7
21	Pemerasan	4	-	4
22	Pornografi	4	-	4
23	Jaminan Fidusia	7	1	8
24	KDRT	3	6	9
25	Kehutanan	7	1	8
26	Pembakaran	1	1	2
27	Kekerasan Terhadap Wanita dan Anak	1	-	1
28	Merusak Barang	2	-	2
29	Perjudian	1	2	3
Jumlah				950

Sumber : Bagian Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember Bulan April 2026.

Berdasarkan hasil keterangan yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar yang masuk LAPAS karena kasus narkotika (Tabel 4.1). Dengan mengetahui data tentang jenis kejahatan yang ada di LAPAS Jember sebagai upaya untuk mengetahui sejauh mana Lembaga Pemasyarakatan dalam mengarahkan narapidana untuk memperoleh pembinaan yang sesuai dan agar dapat merubah

narapidana menjadi manusia yang lebih baik ketika keluar dari LAPAS. Data tersebut juga memungkinkan untuk lebih jauh mengetahui tentang motif narapidana melakukan kejahatan. Kebanyakan narapidana mengaku bahwa mereka melakukan kejahatan karena alasan ekonomi dan moral. Moral menjadi suatu alasan yang logis untuk seseorang dalam melakukan kejahatan selain alasan ekonomi. Hal ini disebabkan moral mendominasi kehidupan seseorang dalam bertingkah laku. Sebagai contoh seseorang dengan kemapanan ekonomi tetapi mempunyai moral yang kurang ketika orang tersebut berada di suatu posisi di mana ada peluang untuk melakukan kejahatan maka orang tersebut akan melakukannya

Tabel 4.2 Data WBP yang Mengikuti Program Bimbingan Kerja Tahun 2026

No	Jenis Kejahatan	Jumlah
1	Narkotika	33
2	Penipuan	1
3	Pencurian	3
4	Pembunuhan	2
5	Perampokan	1
6	Penggelapan	2
7	Uang Palsu	1
8	Penganiayaan Anak	13
	Jumlah	56

Sumber : Bagian Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember Bulan April 2026.

Berdasarkan Tabel 4.2 ditunjukkan bahwa yang mengikuti pembinaan keterampilan berjumlah 56 narapidana dari total 950 narapidana. Hal ini menunjukkan narapidana ada yang memilih atau ditempatkan pada pembinaan di luar keterampilan seperti pembinaan keagamaan dan pembinaan moral. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember narapidana hanya diperbolehkan mengambil satu jenis pembinaan keterampilan dan tidak diperbolehkan untuk pindah pembinaan kecuali atas ijin dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

4.3 Program Bimbingan Kerja

Program bimbingan kerja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah pembinaan kemandirian yang bertujuan membekali Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan keterampilan praktis, sertifikasi kerja, dan jiwa

kewirausahaan. Program ini mencakup pelatihan pertukangan, menjahit, pertanian, kerajinan, kuliner, dan hidroponik, agar mereka produktif dan siap berintegrasi kembali ke masyarakat. Berdasarkan temuan lapangan dan wawancara dengan beberapa orang responden bahwa program bimbingan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember merupakan salah satu upaya pemberdayaan yang signifikan dalam mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk kehidupan setelah masa hukuman. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa aspek utama dari program ini meliputi keterampilan yang diberikan, keunggulan dan keunikan program, serta keterlibatan aktif WBP. Pertama *skill* yang diberikan kepada WBP melalui program bimbingan kerja menawarkan berbagai keterampilan praktis yang mencakup pembuatan meubel, tata boga, pembuatan perabotan, *barbershop*, serta perkebunan. Program ini berfokus pada peningkatan keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

4.3.1 Perencanaan Program Bimbingan Kerja

Proses pembinaan di Lapas dirancang secara sistematis melalui tahapan yang berjenjang untuk mempersiapkan warga binaan kembali ke masyarakat. Dimulai dari masa administrasi dan orientasi (0–1/3) untuk penyesuaian diri dan pengenalan aturan, pembinaan berlanjut ke tahap pembinaan kepribadian (1/3–1/2) yang berfokus pada pendidikan, kerohanian, serta kesehatan mental dan fisik sebagai fondasi karakter. Setelah pondasi tersebut terbentuk, warga binaan memasuki fase pembinaan kemandirian (1/2–2/3) di bawah unit bimbingan kerja, di mana mereka diberikan bekal keterampilan praktis seperti pertukangan, kerajinan tangan, hingga peternakan untuk menunjang produktivitas. Puncaknya, setelah melewati masa dua pertiga pidana, warga binaan yang memenuhi syarat akan mengikuti masa integrasi melalui program cuti bersyarat atau pembebasan bersyarat, yang memungkinkan mereka menjalani sisa masa pembinaan di luar Lapas di bawah pengawasan ketat Balai Pemasyarakatan (Bapas). Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bambang Heriyanto, yaitu:

“Mulai dari nol sampai sepertiga awal itu masa administrasi orientasi. Terus ada masa sepertiga sampai setengah itu adalah masa pembinaan awal. Dan setengah sampai dua per tiga itu masa pembinaan lanjutan. Setelah dua per tiga

itu adalah masa integrasi. Pada posisi di sepertiga sampai setengah itu dilakukan pembinaan yang sifatnya berkaitan dengan pembinaan kepribadian, setengah sampai dengan dua per tiga itu akan menjalani pembinaan kemandirian. Setelah itu, dua per tiga itu masa integrasi, itu mereka itu di akan diikutkan yang memenuhi syarat, itu akan diikutkan program baik itu cuti bersyarat maupun pembebasan bersyarat. Dengan harapan mereka bisa menjalani pembinaan itu di luar Lapas nantinya.”

Proses pembinaan warga binaan di dalam Lapas sesungguhnya berpijak pada prinsip individualisasi yang sangat kuat, di mana setiap individu mendapatkan pendampingan khusus melalui peran seorang wali pemsayarakatan. Peran wali ini menjadi sangat krusial karena mereka bertindak sebagai pemandu utama yang melakukan asesmen mendalam untuk memetakan bakat, minat, serta kapasitas masing-masing warga binaan. Proses asesmen ini tidak dilakukan secara asal, melainkan melalui pendekatan dialogis untuk mengidentifikasi apakah warga binaan sudah memiliki keterampilan tertentu yang dapat dikembangkan, atau justru memiliki minat baru yang ingin dipelajari sebagai bekal di masa depan. Setelah pemetaan potensi tersebut dilakukan, usulan penempatan warga binaan kemudian dibawa ke dalam forum formal yaitu Sidang Tim Pengamat Pemsayarakatan (TPP). Dalam forum inilah dilakukan pembahasan secara komprehensif oleh berbagai unsur terkait untuk meninjau kelayakan, kesiapan, serta aspek keamanan dari warga binaan yang bersangkutan sebelum mereka diizinkan mengikuti program pembinaan teknis atau keterampilan. Keputusan yang dihasilkan dari sidang TPP ini kemudian menjadi dasar pijakan bagi Kalapas untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) resmi. Melalui mekanisme yang terstruktur dan legalistik inilah, setiap langkah pembinaan baik itu di bidang kemandirian maupun kepribadian dapat dipastikan berjalan secara objektif, transparan, dan benar-benar sesuai dengan profil kebutuhan serta tujuan rehabilitasi masing-masing warga binaan. Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak Bambang Heriyanto, yaitu:

“Setiap warga binaan itu mempunyai wali, yang dimana wali ini sangat paham dengan melalui asesmen untuk mencari bakat minat dari narapidana agar bisa langsung diarahkan ke bimbingan kerja. Selanjutnya ada sidang TPP yang

menentukan disetujui atau tidaknya mereka untuk ditempatkan di bimbingan kerja. Kepala LAPAS akan membuat surat keputusan untuk mereka yang sudah memenuhi syarat.”

Kriteria seleksi yang diterapkan dalam memilih warga binaan untuk mengikuti program pembinaan terutama di unit bimbingan kerja sangat rasional dan berbasis pada manajemen risiko serta potensi keberhasilan jangka panjang. Dengan memprioritaskan warga binaan yang berperilaku baik, memiliki dukungan sosial yang kuat dari keluarga, serta sudah memiliki dasar keterampilan atau minat yang tinggi.

Berikut adalah uraian mengenai mengapa kriteria-kriteria tersebut menjadi penentu krusial dalam keberhasilan program pembinaan:

- a. Perilaku Baik sebagai Fondasi: Kedisiplinan adalah syarat mutlak. Narapidana yang menunjukkan perilaku baik membuktikan bahwa mereka memiliki kesiapan mental untuk mengikuti aturan dan berkomitmen pada program, yang menjadi syarat dasar sebelum masuk ke pelatihan teknis yang lebih kompleks.
- b. Dukungan Keluarga sebagai "Jaring Pengaman": Frekuensi kunjungan keluarga merupakan indikator penting adanya *support system* yang sehat. Narapidana yang sering dikunjungi cenderung memiliki motivasi lebih tinggi untuk berubah, karena mereka memiliki keterikatan emosional dan tanggung jawab moral terhadap keluarga di luar sana. Hal ini secara signifikan menekan angka pelanggaran (*recidivism risk*) karena mereka memiliki motivasi untuk segera kembali pulang.
- c. Optimalisasi Bakat dan Minat: Mengasah *skill* yang sudah ada (*up-skilling*) jauh lebih efektif daripada mulai dari nol. Dengan menempatkan individu yang sudah memiliki dasar atau minat tinggi, proses transfer ilmu di bimbingan kerja akan lebih cepat, hasilnya lebih berkualitas, dan yang terpenting, warga binaan akan merasa lebih percaya diri dan berdaya saat mereka benar-benar bebas nantinya.

Sinergi dari ketiga kriteria ini menciptakan "kandidat ideal" yang tidak hanya produktif selama di dalam Lapas, tetapi juga jauh lebih siap secara mental dan teknis untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat. Strategi ini secara tidak

langsung juga membantu meringankan beban pengawasan, karena warga binaan yang sibuk dengan kegiatan positif dan memiliki tujuan hidup yang jelas cenderung lebih kooperatif dalam menjaga ketertiban lingkungan. Seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak Syaiful Anam, yaitu:

“Dalam memilih narapidana tentunya ada kriteria, yaitu yang pertama berkelakuan baik, kedua narapidana yang sering dikunjungi keluarga karena tingkat untuk melakukan pelanggaran sangat rendah, dan yang ketiga para narapidana yang mempunyai skill maka kita asah disini.”

Pendekatan personal melalui sesi wawancara atau obrolan santai yang dilakukan adalah kunci utama dalam membangun keterikatan (*engagement*) antara petugas dan warga binaan. Sesi ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah metode asesmen kualitatif yang sangat efektif untuk menggali profil psikologis dan potensi praktis mereka.

Melalui interaksi langsung tersebut, ada beberapa aspek krusial, yaitu:

- a. Validasi Kapasitas: Observasi antar warga binaan yang memiliki *skill* teknis murni dari pengalaman masa lalu, dan mana yang sekadar memiliki antusiasme untuk belajar hal baru.
- b. Pengenalan Latar Belakang: Dengan mengetahui alamat dan asal-usul, bisa memahami konteks sosial mereka, yang sangat membantu dalam menentukan jenis keterampilan apa yang nantinya akan relevan dan "menjual" saat mereka kembali ke lingkungan asal mereka setelah bebas nanti.
- c. Membangun Kepercayaan (*Rapport*): Ketika seorang warga binaan merasa didengarkan dan diperhatikan secara personal oleh petugas, mereka cenderung merasa dihargai sebagai manusia. Hal ini secara drastis meningkatkan motivasi kerja mereka, karena mereka tidak lagi merasa sekadar menjalankan "tugas," melainkan sedang berinvestasi untuk masa depan mereka sendiri.
- d. Identifikasi "Percikan" Semangat: ketulusan dan semangat untuk berubah. Intuisi sebagai petugas di lapangan sering kali menjadi penentu terbaik untuk memutuskan apakah seseorang layak ditempatkan di unit bimbingan kerja yang memerlukan ketekunan tinggi.

Obrolan" tersebut adalah bentuk nyata dari *human-centered approach* dalam

sistem pemasyarakatan. Tidak hanya mengelola narapidana sebagai objek pembinaan, tetapi memanusiakan mereka sehingga program yang di berikan (seperti kerajinan atau bengkel) akan diterima dengan rasa tanggung jawab yang lebih besar oleh yang bersangkutan. Menerapkan masa percobaan selama satu bulan sebelum menetapkan warga binaan di unit bimbingan kerja adalah langkah mitigasi risiko yang sangat strategis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tidak hanya mengandalkan data di atas kertas atau sesi wawancara awal saja, melainkan memberikan ruang pembuktian melalui tindakan nyata. Praktik ini menciptakan standar profesionalisme yang tinggi di dalam Lapas. Warga binaan jadi memahami bahwa kesempatan untuk ikut serta dalam bimbingan kerja adalah sebuah "hak istimewa" yang harus diperjuangkan dengan kedisiplinan dan kesungguhan, bukan sekadar pelimpahan tugas. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fahmi, yaitu :

“Kita training dulu disini selama kurang lebih satu bulan. Baru kita dapat menilai dia layak atau tidak disini.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pendekatan ini menunjukkan bahwa unit Bimbingan Kerja bukan hanya sekadar tempat produksi, melainkan sebuah sekolah vokasi yang mengutamakan pengembangan manusia.

4.3.2 Pelaksanaan Program Bimbingan Kerja

Proses pelaksanaan keterampilan di unit bimbingan kerja (Bimker) berjalan melalui sebuah siklus pembelajaran yang integratif antara pendampingan internal dan pelatihan formal. Awalnya, warga binaan yang memiliki kemauan belajar namun belum memiliki *skill* teknis akan ditempatkan dalam sistem *mentoring* sebaya, di mana mereka belajar langsung dari rekan-rekan senior yang sudah lebih berpengalaman di bawah pengawasan ketat petugas. Tahapan ini berfungsi sebagai fase adaptasi sekaligus pemetaan potensi dasar. Setelah individu tersebut menunjukkan kesiapan, mereka kemudian diikutsertakan dalam program pelatihan formal yang di kerjasamakan dengan pihak ketiga, seperti instruktur kompeten yang didanai melalui anggaran pemerintah untuk memberikan standar keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja nyata. Sinergi antara praktik harian di bengkel kerja dengan pelatihan profesional yang berkala ini memastikan bahwa setiap warga binaan tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga pengalaman aplikatif yang

terukur, sehingga mereka memiliki bekal keterampilan yang solid dan siap digunakan saat memasuki masa integrasi di masyarakat.

Tabel 4.3 Jadwal Program Bimbingan Kerja

Hari	Jam Kerja
Senin	07.30-15.00
Selasa	07.30-15.00
Rabu	07.30-15.00
Kamis	07.30-15.00
Jum'at	07.30-11.30
Sabtu	07.30-11.30
Minggu	Libur

Sumber : Bagian Bimbingan Kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember Bulan April 2026

Keberagaman program yang dimiliki Lapas mulai dari jasa (*barbershop*, *laundry*), kuliner (tata boga), hingga sektor teknis dan produktif (meubel, *handicraft*, pertanian, perikanan, dan konstruksi) hal ini menunjukkan bahwa unit Bimbingan Kerja yang dikelola telah bertransformasi menjadi sebuah pusat vokasi yang sangat komprehensif. Menambahkan pelatihan spesifik seperti pemasangan keramik adalah langkah yang sangat cerdas, karena keterampilan konstruksi seperti ini memiliki permintaan pasar yang sangat tinggi di luar sana. Dengan menjadikan hasil pelatihan sebagai sarana belajar langsung, warga binaan mendapatkan pengalaman nyata yang jauh lebih berharga daripada sekadar teori. Hal ini tidak hanya mempercantik fasilitas Lapas, tetapi juga memberikan kebanggaan tersendiri bagi mereka karena melihat hasil karya mereka terpasang dengan rapi dan dapat digunakan. Sinergi antara kegiatan produksi di unit bimbingan kerja dengan distribusi pasar melalui Koperasi (Primkop Pasindo) adalah langkah strategis yang sangat krusial. Keberhasilan sebuah unit bimbingan kerja memang tidak hanya diukur dari keterampilan yang diajarkan, tetapi juga dari kemampuan mengolah *output* agar memiliki nilai ekonomi dan terserap oleh pasar. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Syaiful Anam, yaitu :

“Kita harus juga mampu mengolah output yang dihasilkan. Nah, output yang dihasilkan itu kan kita mengikuti pasar. Nah, selama ini pasarnya kita masih itu, ya handicraft, mebeler, tata boga. Untuk tata boga kan kita kerja sama dengan koperasi, Primkop Pasindo, jualannya di kantin.”

Pembinaan bimbingan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember disesuaikan dengan minat dan bakat narapidana. Pembinaan bimbingan kerja di LAPAS Jember dibawah kordinasi bapak Syaiful Anam, sebagai Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja. Keterampilan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember meliputi :

a. Perkebunan

Pembinaan keterampilan perkebunan diterapkan karena dilatar belakangi oleh minat dan bakat narapidana. Selain itu karena LAPAS mempunyai lahan yang cukup untuk diadakan pembinaan kerja perkebunan. Narapidana diajarkan untuk mengelola sayur-sayuran seperti sawi dan kangkung. Selain dikonsumsi sendiri, hasil dari perkebunan tersebut dijual untuk tambahan biaya operasional pembinaan perkebunan. Sekarang yang mengikuti pembinaan ini berjumlah 6 orang.



Gambar 4.3 Keterampilan Perkebunan

b. Kerajinan Tangan

Keterampilan ini yang paling banyak diikuti dan diminati oleh warga binaan. Hal ini disebabkan karena dalam prakteknya keterampilan ini sangat erat hubungannya dalam dunia perbengkelan. Keterampilan ini meliputi pembuatan talenan, wadah pisau, rak bumbu dapur, miniatur mobil dan rumah. Bahan pembuatannya juga tergolong mudah karena menggunakan limbah dari pembinaan

keterampilan lain. Sekarang yang mengikuti pembinaan ini berjumlah 15 orang.



Gambar 4.4 Keterampilan Kerajinan Tangan

c. Tata Boga

Pembinaan tata boga di LAPAS Jember adalah program pembinaan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan di bidang seni memasak, pengolahan makanan, serta manajemen kuliner. pembinaan ini bertujuan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar kompeten dalam mengolah dan menyajikan berbagai jenis makanan, mulai dari makanan pembuka, makanan utama, hingga makanan penutup, serta memahami prinsip-prinsip gizi dan kesehatan. Dalam pembinaan ini diikuti oleh 12 orang.



Gambar 4.5 Keterampilan Tata Boga

d. Meubel

Pembinaan kemandirian dalam bentuk keterampilan pembuatan meubel disesuaikan dengan minat dan bakat para. Narapidana diberi pengetahuan tentang cara pemakaian alat dan cara kerja alat-alatnya setelah memahami semuanya dengan benar baru diterjunkan langsung menggunakan alat-alat tersebut dengan bimbingan warga binaan yang sudah terampil dan arahan dari petugas LAPAS.

Pembinaan ini disesuaikan dengan pesanan dari pihak luar LAPAS seperti

pembuatan meja dan kursi. Selain memenuhi pesanan juga dijual sendiri oleh petugas LAPAS dan hasilnya untuk operasional pembinaan dan warga binaan juga mendapat premi atau upah dari hasil karya tersebut. Dalam pembinaan ini diikuti oleh 12 orang.



Gambar 4.6 Keterampilan Meubel

e. Pertukangan

Pembinaan kemandirian dalam bentuk keterampilan pertukangan ini disesuaikan dengan minat para narapidana. Narapidana diajarkan tentang bagaimana cara penggunaan alat pertukangan, setelah dapat memahami alat-alat tersebut para narapidana diterjukkan langsung untuk menggunakan alat tersebut. Pembinaan pertukangan sendiri diajarkan pekerjaan-pekerjaan umum seperti pemasangan keramik, pembuatan kusen kayu, pembuatan tiang bangunan kayu, dan pemasangan atap baja ringan, warga binaan juga mendapat premi atau upah dari hasil kerjanya tersebut. Dalam pembinaan ini diikuti oleh 8 orang.



Gambar 4.7 Keterampilan Pertukangan

f. *Barbershop*

Pembinaan kemandirian ini dipilih karena ada narapidana yang mempunyai minat dan bakat dalam hal keterampilan memotong rambut. Pembinaan ini dipilih dengan alasan banyak permintaan dari para narapidana yang ingin memotong rambut maka dari pihak LAPAS membuka pembinaan kerja *barbershop* ini. Dalam pembinaan ini diikuti oleh 3 orang.



Gambar 4.8 Keterampilan *Barbershop*
(LAPAS KELAS II A Jember, 2026)

Kemampuan dalam mengelola keuangan unit Bimbingan Kerja secara mandiri dengan mengalokasikan kembali hasil penjualan untuk pengadaan dan perawatan peralatan adalah kunci keberlanjutan yang luar biasa. Ketergantungan pada anggaran BMN memang ada batasnya, sehingga strategi reinvestasi profit ini menunjukkan kemandirian manajerial yang sangat profesional. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fahmi :

“Untuk peralatannya, itu ada yang memang dari BMN (Barang Milik Negara), dari kantor memang. Tapi, berhubung di sini itu enggak bisa mengandalkan itu juga, kita juga dari hasil penjualan, nah, kita alokasikan ke perawatan peralatan.”

Menjalankan unit bimbingan kerja di tengah keterbatasan sarana dan prasarana menuntut kreativitas serta ketangguhan manajerial yang tinggi. Kendala utama seperti minimnya peralatan standar dan ruang operasional yang terbatas tidak dipandang sebagai hambatan yang menghentikan proses pembinaan, melainkan sebagai tantangan untuk terus berinovasi. Karena proses pengadaan melalui mekanisme Barang Milik Negara (BMN) membutuhkan prosedur panjang dan

persetujuan pusat, secara mandiri membangun budaya pemeliharaan aset yang disiplin dengan melakukan perbaikan secara swadaya. Strategi ini tidak hanya memastikan roda produksi tetap berputar, tetapi juga menanamkan etos kerja kepada warga binaan tentang pentingnya efisiensi dan tanggung jawab terhadap alat kerja. Dengan mengoptimalkan apa yang ada, situasi keterbatasan tersebut menjadi ruang belajar yang realistis, di mana warga binaan diajarkan untuk memecahkan masalah dan tetap produktif meski di tengah keterbatasan fasilitas.

Menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana di tengah tuntutan pemenuhan pesanan pasar menjadi tantangan operasional yang sangat nyata bagi unit bimbingan kerja. Ketiadaan peralatan yang memadai sering kali membatasi kapasitas produksi, terutama pada sektor kerajinan yang membutuhkan presisi tinggi, sehingga tidak jarang pesanan tidak dapat dipenuhi secara maksimal. Kendala ini semakin kompleks dengan profil pekerja yang harus dibina dari nol, yang menuntut kesabaran ekstra serta pendampingan yang intensif dan berulang-ulang dari petugas. Meski dihadapkan pada situasi yang menuntut ketelatenan luar biasa tersebut, proses bimbingan tetap dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari komitmen rehabilitasi, di mana setiap kesulitan teknis di lapangan justru diubah menjadi momen edukasi untuk membentuk mental kerja yang tangguh dan adaptif bagi warga binaan.

Bagi warga binaan, unit bimbingan kerja (Bimker) bukan sekadar tempat untuk menjalani masa pidana, melainkan sebuah ruang aktualisasi diri yang sangat berarti dalam mengusir kejenuhan. Dengan ritme kerja yang padat dan pesanan yang terus mengalir, Bimker menjadi pusat kegiatan paling produktif di Lapas, yang secara psikologis membantu mereka tetap sibuk dan fokus pada hal-hal positif. Rutinitas pekerjaan harian yang konsisten ini berfungsi sebagai penawar stres yang efektif, di mana setiap individu merasa dihargai melalui kontribusi nyata dari hasil karya mereka. Dedikasi dalam menjaga roda produksi tetap berputar, meski di tengah berbagai keterbatasan, pada akhirnya menciptakan suasana kerja yang dinamis, mengubah kewajiban menjalani masa hukuman menjadi sebuah pengalaman hidup yang produktif, bermakna, dan memberikan ketenangan batin bagi warga binaan hingga masa integrasi mereka tiba. Hal ini diungkapkan oleh

narapidana mas andy, yaitu :

“Kalau saya pribadi sih, tujuannya buat cari kesibukan. Karena aktivitas kita kalau di luar bimker enggak ada. Karena yang paling produktif di sini. Yang paling produktif di bimker ini. Karena kita kan kalau untuk pekerjaan setiap hari ada. Terutama pesanan, pesanan kita alhamdulillah banyak terus. Dari situ tidak ada matinya kita kerja. Yang bikin apa ya? Kita enggak jenuh.”

Mas lutfi juga mengungkapkan demikian:

“Tujuannya yang untuk pembinaan kemandirian, untuk mengasah skill para narapidana.”

4.3.3 Evaluasi Program Bimbingan Kerja

Penerapan sistem evaluasi internal yang dilakukan secara konsisten setiap minggu menjadi instrumen utama dalam menjaga kedisiplinan dan kualitas kerja di unit bimbingan kerja. Proses ini mencakup pemantauan harian terhadap kinerja serta perilaku warga binaan, di mana komunikasi bersifat motivatif diberikan bagi mereka yang tetap patuh, sementara evaluasi mendalam segera diterapkan bagi mereka yang menunjukkan penyimpangan. Dengan mengedepankan prinsip keadilan yang bertingkat mulai dari teguran untuk pelanggaran ringan hingga pemberhentian dari unit kerja untuk pelanggaran sedang maupun berat. Pendekatan ini memastikan bahwa kesempatan untuk berkarya di Bimker tetap dipandang sebagai hak istimewa yang harus dijaga oleh setiap warga binaan melalui kepatuhan terhadap aturan dan dedikasi pada pekerjaan, sehingga integritas program pembinaan tetap terjaga dengan baik. Seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak Syaiful Anam :

“Tiap hari kita pantau mereka. Selama mereka berjalan sesuai aturan, ya berarti enggak ada evaluasi dari kita, mungkin hanya motivasi untuk tetap sesuai arahan, tidak melanggar aturan. Kalau evaluasi internal dari kita, hanya untuk catatan, itu kita laksanakan tiap minggu “

Sistem pengawasan di unit bimbingan kerja dijalankan melalui evaluasi kinerja yang bersifat harian untuk memastikan setiap kendala atau pelanggaran dapat diidentifikasi dan ditangani secara langsung oleh Kasubsi. Pendekatan ini sangat krusial mengingat lingkungan kerja yang melibatkan peralatan mekanis dan

benda tajam, sehingga akses ke area produksi dibatasi secara ketat hanya bagi warga binaan yang telah terpilih. Kebijakan sterilisasi area ini berfungsi sebagai tindakan preventif untuk meminimalisasi risiko keamanan, seperti penyalahgunaan alat-alat kerja yang berpotensi membahayakan warga binaan lain di blok hunian. Dengan mengintegrasikan evaluasi kinerja harian dan protokol keamanan yang disiplin, menciptakan lingkungan pembinaan yang tidak hanya produktif, tetapi juga aman bagi seluruh penghuni, memastikan bahwa setiap proses pembelajaran berjalan sesuai dengan prosedur masyarakatan yang ketat. Hal ini disampaikan oleh Bapak Fahmi :

"Setiap harinya memang kita evaluasi. Karena di sini kan enggak bisa kita lepas anak-anak. Apalagi yang bagian kerajinan itu kan ada pagar itu. Itu dari blok napi enggak boleh masuk di area situ. Itu area terlarang untuk napi yang lain. Karena di situ ada peralatan, ada mesin-mesin kan, yang tajam-tajam. Takutnya nanti ada yang dibawa ke kamar, gitu. Bahaya, membahayakan yang lain."

Pendekatan motivasi yang diterapkan di unit Bimbingan Kerja bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan sebuah bentuk pendampingan yang menyentuh aspek psikologis terhadap warga binaan. Dengan terus memberikan dorongan dan menekankan bahwa setiap keterampilan yang mereka asah di dalam Lapas adalah "modal" krusial untuk bertahan hidup setelah bebas nanti. Motivasi ini berperan sebagai pengikat kuat yang membantu mereka tetap fokus dan produktif, bahkan di tengah keterbatasan sarana dan prasarana. Integrasi antara pelatihan teknis yang intensif dengan dukungan moral yang berkelanjutan ini menciptakan pondasi yang solid bagi warga binaan untuk memutus rantai residivisme, karena mereka kini memiliki bekal keahlian nyata serta kepercayaan diri yang cukup untuk berintegrasi kembali ke masyarakat sebagai warga yang produktif, bermartabat, dan mampu mencari nafkah secara sah setelah masa integrasi mereka berakhir.

4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat

4.4.1 Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan faktor yang memberi pengaruh positif terhadap upaya LAPAS dalam pembinaan keterampilan bagi narapidana.

- a. Pemberian Apresiasi sebagai Pendekatan Insentif di Lingkungan Bimbingan

Kerja

Pemberian apresiasi kecil seperti kopi dan rokok dalam keseharian di unit bimbingan kerja merupakan bentuk pendekatan berbasis insentif yang sangat manusiawi. Langkah ini, meski terlihat sederhana, memiliki dampak psikologis yang cukup besar dalam menjaga stabilitas dan semangat kerja di lingkungan yang terbatas ruang geraknya. Dengan memberikan perhatian pada aspek kesejahteraan mereka, operasional Bimker tidak hanya berjalan karena keterpaksaan, tetapi juga karena adanya rasa kebersamaan. Hal ini disampaikan juga oleh Bapak Fahmi :

“memang kita apresiasi kita, setiap hari kita kasih rokok, kita kasih apa, kayak kopi, gitu loh, biar lebih semangat lagi”

b. Pemberian Premi/ Upah

Skema pembagian hasil produksi yang diterapkan merupakan model manajemen ekonomi yang sangat transparan dan akuntabel. Dengan membagi pendapatan secara proporsional, tidak hanya memenuhi kewajiban negara (PNBP), tetapi juga memberikan insentif nyata bagi warga binaan sekaligus menjamin keberlangsungan operasional unit melalui modal kerja.

Berikut adalah rincian alokasi pendapatan tersebut:

- 50% untuk Warga Binaan (Pekerja): Ini adalah bentuk apresiasi langsung atas tenaga dan waktu yang mereka berikan. Bagi mereka, ini bukan sekadar uang, melainkan bukti bahwa mereka mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu yang bernilai secara ekonomi. Hal ini menjadi motivasi utama untuk tetap produktif.
- 15% untuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak): Sebagai unit di bawah naungan negara, ini adalah wujud ketaatan pada regulasi. Memenuhi kewajiban setoran negara secara rutin menunjukkan bahwa unit Bimker dikelola dengan sistem yang formal dan bisa dipertanggungjawabkan.
- 35% untuk Modal Kerja: Alokasi ini sangat krusial, karena keterbatasan pengadaan dari pusat (BMN), modal ini menjadi "napas" bagi unit untuk melakukan membeli bahan baku, memperbaiki mesin yang rusak, atau menambah peralatan baru guna meningkatkan kapasitas produksi.

Sistem tersebut menciptakan lingkaran ekonomi yang berkelanjutan: insentif

bagi pekerja membuat mereka tetap semangat, setoran PNBPN menjaga legalitas unit, dan cadangan modal memastikan bahwa produksi tidak berhenti hanya karena kendala anggaran dari pusat. Sistem penyaluran insentif melalui top-up kartu Brizzi ini adalah solusi yang sangat cerdas dan patuh pada regulasi internal Lapas. Sistem ini mengubah hasil keringat mereka menjadi saldo digital yang dapat digunakan untuk belanja adalah cara yang sangat elegan untuk memastikan bahwa "upah" mereka memberikan dampak positif yang maksimal bagi kesehatan dan kenyamanan hidup mereka selama menjalani masa pembinaan.

4.4.2 Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan faktor yang memberi pengaruh negatif terhadap upaya LAPAS dalam melaksanakan pembinaan keterampilan bagi narapidana.

a. Penyusupan Barang Milik Bimbingan Kerja (Bimker) ke Dalam Blok Hunian

Insiden penyusupan peralatan kerja ke dalam blok hunian merupakan risiko operasional yang menuntut evaluasi mendalam terhadap protokol keamanan di unit Bimbingan Kerja. Kejadian tersebut menjadi pengingat keras bahwa dalam lingkungan pemasyarakatan, integrasi antara aspek pembinaan produktif dan keamanan fisik (*security*) harus berjalan beriringan tanpa celah sedikit pun. Kewaspadaan petugas menjadi taruhan utama, di mana kelalaian sekecil apa pun dalam prosedur *screening* atau kontrol inventaris dapat berakibat fatal bagi keselamatan warga binaan lainnya. Oleh karena itu, pengawasan harian yang ketat termasuk kebijakan sterilisasi area kerja dan prosedur *body check* yang disiplin sebelum warga binaan kembali ke kamar harus diperkuat secara konsisten. Langkah preventif seperti penggunaan kartu kendali peralatan (*check-in/check-out*) serta penegakan sanksi yang tegas bagi mereka yang terbukti membawa alat keluar area kerja menjadi sangat krusial untuk memulihkan integritas unit.

b. Pemberhentian Warga Binaan Akibat Pelanggaran Disiplin Kerja

Pemberhentian warga binaan yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, seperti menyalahgunakan peralatan kerja, memang membawa konsekuensi operasional yang cukup kompleks bagi produktivitas unit Bimbingan Kerja. Meskipun tindakan tegas tersebut mutlak diperlukan sebagai bentuk penegakan

keamanan dan integritas mengingat satu kelalaian bisa membahayakan seluruh penghuni Lapas keputusan tersebut secara langsung menciptakan tantangan manajerial yang baru. Unit bimbingan kerja harus kembali ke titik nol, yakni mencari pengganti dan mengulang kembali proses pelatihan dari dasar agar pekerja baru tersebut mampu memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan. Proses transisi ini sering kali memakan waktu yang cukup lama, yang pada akhirnya berdampak pada keterlambatan pemenuhan pesanan pelanggan yang sedang berjalan. Dinamika ini menempatkan dalam posisi yang sangat menuntut ketelatenan tinggi, namun di sisi lain, aspek keamanan dan kedisiplinan tetap menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Tantangan ini pada dasarnya membuktikan betapa sulitnya menjaga keseimbangan antara target ekonomi unit kerja dengan upaya rehabilitasi yang disiplin, di mana setiap langkah yang diambil merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa program pembinaan tetap berjalan aman, produktif, dan berorientasi pada pembentukan karakter warga binaan yang lebih baik. Hal ini disampaikan oleh Bapak Fahmi :

“Tindakannya kalau memang itu dikatakan fatal untuk pekerja ini, kita berhentikan. Berhubung pekerja ini ada pelanggaran, ya harus kita keluarkan. Memang harus diberhentikan. Nah, terus untuk menggantinya posisinya ini kan kita harus training lagi, cari lagi. Itu yang kadang itu waktunya itu lebih lama lagi.”

4.5 Analisis Teori

Narapidana sebagai peserta pembelajaran vokasi memiliki pengalaman hidup, kesadaran sosial, dan kebutuhan nyata untuk meningkatkan kualitas kehidupannya setelah menjalani masa pidana. Oleh sebab itu, pendekatan andragogi menempatkan warga binaan sebagai subjek pembelajaran yang berperan aktif dalam proses belajar. Menurut Freire (2010) pada penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran bagi narapidana merupakan proses pendidikan yang bersifat dialogis dan membebaskan, bukan sekadar penyampaian pengetahuan secara satu arah.

Freire (2010) menjelaskan bahwa konsep *banking education* menempatkan fasilitator sebagai pihak dominan dalam pembelajaran, sedangkan peserta didik hanya berperan sebagai penerima informasi secara pasif. Pendekatan tersebut tidak

mampu menghasilkan perubahan kesadaran yang mendalam pada peserta didik dewasa. Dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, pembelajaran vokasi melalui program bimbingan kerja menuntut penerapan pendekatan *problem-posing education*, yaitu pembelajaran yang mengedepankan dialog antara petugas pembina dan narapidana. Melalui proses dialogis tersebut, narapidana memahami realitas sosial, merefleksikan kesalahan masa lalu, serta mengenali peluang masa depan melalui penguasaan keterampilan kerja.

Konsep *conscientization* atau penyadaran kritis yang dikemukakan Freire menjadi dasar penting dalam pembinaan keterampilan narapidana. Pembelajaran vokasi tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan teknis, seperti menjahit, pertukangan, dan pengelasan, tetapi juga bertujuan membangun kesadaran diri narapidana agar mampu mengelola kehidupannya secara mandiri setelah kembali ke masyarakat. Prinsip andragogi Freire menegaskan bahwa proses pembelajaran orang dewasa berlangsung melalui interaksi sosial dan pengalaman bersama. Dalam praktik pembinaan di lembaga pemasyarakatan, petugas bimbingan kerja berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses belajar, bukan sebagai pengendali yang bersifat otoriter. Narapidana berpartisipasi secara aktif melalui praktik kerja langsung, diskusi kelompok, dan kegiatan produksi yang memungkinkan mereka memahami nilai kerja secara nyata dan aplikatif. Oleh karena itu, pembelajaran vokasi berfungsi tidak hanya sebagai pelatihan kerja, tetapi juga sebagai strategi pembinaan yang mendorong perubahan perilaku, peningkatan kemandirian, dan pencegahan pengulangan tindak pidana.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran vokasi melalui program bimbingan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember berperan sebagai strategi pembinaan yang efektif dalam meningkatkan keterampilan sekaligus membentuk karakter narapidana. Pelaksanaan pembelajaran vokasi tidak hanya berfokus pada pemberian kemampuan teknis kerja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kerja sama, dan etos kerja melalui praktik langsung yang terarah dan berkelanjutan. Proses pembinaan tersebut memberikan pengalaman nyata kepada warga binaan dalam mengembangkan potensi diri, meningkatkan rasa percaya diri, serta menumbuhkan kesadaran untuk menjalani kehidupan yang lebih produktif. Dengan adanya program bimbingan kerja, narapidana memperoleh bekal keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja sehingga mampu mempersiapkan diri untuk kembali berintegrasi secara sosial, hidup mandiri, serta berperan aktif dan positif di tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa pidana.

5.2 Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga pemasyarakatan seharusnya menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang cukup. untuk program bimbingan kerja karena narapidana diharuskan untuk menghadiri program bimbingan kerja meski fasilitas dan infrastruktur yang tersedia tidak cukup memadai sehingga tidak semua narapidana dapat berpartisipasi dalam program bimbingan kerja.
- b. Sebagaimana peraturan perundang-undangan Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 angka 3 di sebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Dari hal tersebut maka seharusnya warga binaan pemasyarakatan mendapatkan haknya untuk dibina di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jember.

DAFTAR PUSTAKA

- Azriadi, A. (2011). Pelaksanaan pembinaan narapidana residivis berdasarkan prinsip pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas ii. A biaro (Tinjauan Mengenai Prinsip Pemasyarakatan Tentang Perlindungan Negara) (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Basukiwibawa. (2017). *Manajemen pendidikan teknologi kejuruan dan vokasi* : Bumi Aksara.
- Dhorifah, Kunti. (2019). Rehabilitasi Berbasis Kelembagaan Melalui Peningkatan Kapasitas Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Gulo, W. (2007). *Metodologi Penelitian*.: Grasindo
- Harsono Hs, C.I. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*.: Djambatan
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* : Erlangga.
- Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember. <https://www.facebook.com/photo?fbid=1204776795166051&set=pcb.1204776861832711>. [Diakses pada 06 Mei 2026].
- Mangunhardjana, AM. (1991). *Pembinaan Arti dan Metodenya*.: Kanisius
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. :PT Remaja Rosdakarya Offset
- Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong. (2010). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* edisi ketiga. : Prenada Media Group
- Poernomo, Bambang. (1986). *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*.: Liberty
- Rusita, Diyan. (2013). Proses Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso, Universitas Jember

Saifuddin, Muhammad. (2010). *Andragogi (Teori Pembelajaran Orang Dewasa)*: Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung.

Soehartono. (2008). *Metode Penelitian Sosial* : PT. Remaja Rosdakarya

Soekanto, Soerjono. (2003). *Sosiologi Suatu Pengantar*: PT Grafindo Persada

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995. *Tentang Pemasysarakatan*

Wijaya, T. (2018). *Manajemen Kualitas Jasa. Edisi Kedua.*: PT.Indeks

Winangun, Kuntang. (2017). "Pendidikan vokasi sebagai pondasi bangsa menghadapi globalisasi." *Jurnal Taman Vokasi* 5 (1).72-78

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi dan Surat Perijinan Penelitian

